

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita)

Maria Nona Ivon¹, Wilhelmina Mitan², Fransiscus De Romario³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : ivonmarianona@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze how the presentation of financial statements at Village-Owned Enterprises (BUMDes) Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera, Nita District. By analyzing the financial statements made by BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera, Nita District, and adjusting to the statement of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM). The research method used in this study is qualitative research with descriptive methods. Data collection is done through interviews, documentation and observation. The results of this study show that in the presentation of financial statements made by BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera has not fully implemented financial statements in accordance with SAK EMKM due to limited knowledge of BUMDes management and the absence of training from related parties.*

Keywords: *Financial Statements, BUMDes, SAK EMKM*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita. Dengan menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita dan menyesuaikan dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM karena keterbatasan pengetahuan pengurus BUMDes dan tidak adanya pelatihan dari pihak terkait.

Kata kunci : Laporan Keuangan, BUMDes, SAK EMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditunjang dengan pembangunan disektor infrastuktur, baik diperkotaan maupun pedesaan. Salah satu program pemerintah dalam satu aspek pembangunan yang sedang dijalankan adalah pembangunan disetiap daerah terkhususnya pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

BUMDes menjadi wadah yang menghimpun dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan pemikiran segala asset ekonomis yang ada didesa dan dikelola sepenuhnya masyarakat desa. Peranan BUMDes diharapkan dapat menurunkan indeks kemiskinan dan mengangkat status sosial keluarga tidak mampu menjadi keluarga sejahtera sehingga pemerataan ekonomi di desa terealisasi (Andriyani, 2017:5).

Received Juni 20, 2023; Revised Juli 21, 2023; Acapted: Agustus 31, 2023

* Maria Nona Ivon, vonmarianona@gmail.com

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian desa tetapi dimaksudkan juga sebagai sumber pendapatan desa, untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai (Rochmansyah,2014:6).

Muyesaro (2021) dalam penelitiannya mengenai Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Menunjukkan hasil bahwa BUMDes Amanah belum membuat laporan keuangan secara lengkap berdasarkan SAK ETAP Nomor 7 yaitu tentang laporan arus kas, dimana SAK ETAP mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus lengkap yaitu mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Penelitian yang sama yang telah dilakukan oleh Sonia Cantika (2022) dalam penelitiannya mengenai Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Trijaya di Desa Balung Lor Kecamatan Balung menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan BUMDes Trijaya Balung Lor masih belum lengkap dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Pencatatan keuangan hanya berupa buku kas umum. Pencatatan keuangan yang dilakukan masi berdasarkan pemahaman pengelola saja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan pada beberapa BUMDes, semua BUMDes rata-rata memiliki masalah yang sama yaitu penerapan laporan keuangan masih sederhana berupa laporan arus kas,buku kas umum dan pengeluaran serta pemasukan kas. Belum ada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan standar.

Alasan utamanya pengetahuan dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai konsep dan standar akuntansi masih terbatas, kurangnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya laporan keuangan yang benar dan tepat bagi usaha yang sedang dijalankan, pembuatan laporan yang masih dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar keuangan.

Dalam penelitian ini menjadi keterbaruan penelitian terletak pada objek penelitian yakni BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita. Kemudian terdapat

perbedaan dalam penelitian dengan studi sebelumnya yakni pada pembahasan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Studi Kasus Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita”.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Dalam teori *agency* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan disebut *agens* (Halim, 2006:13). Teori *agency* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemerintah *principals* dan *agens*. Teori keagenan merupakan interaksi antara agen dan *principal*.

Akuntansi

Menurut Thomas Sumarsan (2020:1) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan Akuntansi

Soemarso (2018:5) tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesatuan ekonomi adalah badan usaha.

Standar Akuntansi

Menurut Yadiati (2007:29) standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu.

Laporan Keuangan

Menurut Hery (2018:3) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk suatu tujuan dimana tertuang dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 mengenai tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perusahaan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bersifat histori, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat.
2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimasukan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan tafsiran dan sebagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.
5. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi, sifat dan informasi yang dilaporkan.
6. Adanya sebagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan.
7. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan.

Dalam praktiknya kita mengenal beberapa jenis laporan keuangan menurut (Kasmir, 2016:67):

1. Neraca

(Kasmir, 2016:67) masing-masing unsur tersebut dapat disubklasifikasikan sebagai berikut:

a. Aktiva

Aktiva merupakan harta atau kekayaan (asset) yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu. Klasifikasi aktiva terdiri dari:

1) Aktiva Lancar

Merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama 1 tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling likuid dibandingkan dengan aktiva lainnya.

2) Aktiva Tetap

Merupakan harta atau kekayaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) dan merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, *goodwill*, dan lisensi.

3) Aktiva Lainnya

Merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan kedalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Seperti bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaiannya.

b. Kewajiban (Hutang)

kewajiban disubklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1) Kewajiban Lancar

Merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar jangka waktu 1 tahun.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memilih jangka waktu lebih dari 1 tahun.

3) Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban yang tidak dapat dikategorikan kedalam salah satu subklasifikasi tersebut, misalnya utang kepada para pemegang saham.

c. Ekuitas

Merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1) Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham (termasuk agio saham bila ada).

2) Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen.

2. Laporan Laba Rugi

Merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2010:81).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan:

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau rugi beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- d. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- e. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian adalah sebagai berikut:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (SAK) tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Pemakaian Laporan Keuangan

PSAK No. 1 (Revisi 2017) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan pemberi pinjaman, pemasok, dan usaha

kredit lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

1. Investor
2. Karyawan
3. Pemberi Pinjaman
4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya
5. Pelanggan
6. Pemerintah
7. Masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB X pasal 87 s/d 90).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB VIII Pasal 123 s/d 142).

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat desa.

2. Mengoptimalkan Aset Desa.
3. Meningkatkan Usaha Masyarakat.
4. Kerja Sama Antar Desa dan atau Pihak Ketiga
5. Menciptakan peluang dan Jaringan Pasar
6. Membuka Lapangan Kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan PAD

Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis-jenis usaha BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu terdiri dari:

1. BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDes ini meliputi:
 - a. Air minum desa
 - b. Usaha listrik desa
 - c. Lumbung pangan dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
2. Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditunjukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - a. Alat transportasi
 - b. Perkakas pesta
 - c. Rumah took
 - d. Tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lainnya
3. Bisnis yang memproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
 - a. Pabrik es
 - b. Pabrik asap cair
 - c. Hasil pertanian
 - d. Sarana produksi pertanian
 - e. Sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya
4. Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, meliputi:

- a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan
- c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan ini digunakan untuk entitas yang usahanya dikategorikan mikro, kecil dan menengah. Untuk membedakan jenis usaha mikro, kecil dan menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 membedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Pengakuan Dan Pengukuran Pada SAK EMKM

Pengakuan unsur laporan keuangan (IAI, 2016) merupakan suatu proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir kedalam atau keluar dari entitas. Pengukuran (IAI, 2016:5) adalah suatu proses penetapan jumlah uang yang mengakui asset, liabilitas, pendapatan, dan beban didalam laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan minimum berdasarkan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi

keuangan pada akhir periode, laporan labarugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan entitas minimum terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

2. Laporan Laba Rugi selama periode.

Laporan laba rugi memasukan semua penghasilan dan beban. Penjelasan pendapatan dan beban tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- b. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

3. Catatan atas laporan keuangan

Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, perspsi, moivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi atau dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai, metode alamiah (Moleong, 2017:5-6).

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data yang selanjutnya data tersebut di analisis (Sugiyono, 2011:207). Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti ini sebagai pengamat atau berperan serta artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan hasil wawancara dengan objek penelitian secermat mungkin sampai pada sekecil-kecilnya sekalipun.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera yang beralamat di Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai 08 Juli 2023.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Indriantoro dan Supomo (2014), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi tempat penelitian yang dituju dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (tidak melalui media perantara) dapat berupa opini subjek penelitian secara individual maupun kelompok.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah berbentuk arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

2. Dokumentasi
3. Observasi

Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi beberapa tahapan:

1. Tahap Pra-Lapangan
2. Tahap Lapangan
3. Tahap Analisa Data
4. Tahap kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unit Usaha dan Transaksi Keuangan Pada BUMDes

BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita dalam menjalankan usahanya ada tiga unit usaha yang dijalankan yang terdiri dari: unit usaha perkreditan, unit usaha perdagangan dan unit pengelolaan pasar. Dari pengamatan yang peneliti dapatkan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera dan mendapatkan hasil bahwa ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan sumber pemasukan kas pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera yaitu transaksi penerimaan dari penjualan.

Dalam kurun waktu tiga tahun BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera memperoleh penjualan atau pendapatan sebagai berikut:

4.1 Tabel Penjualan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera

No.	Tahun	Total Penjualan
1	2020	Rp. 616.802.271
2	2021	Rp. 371.312.169
3	2022	Rp. 1.743.361.758

Sumber: BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera

Berdasarkan pada tabel diatas BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera pada tahun 2020 total penjualan sebesar Rp. 616.802.271, pada tahun 2021 BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera mengalami penurunan sebesar Rp. 371.312.169, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.743.361.758.

4.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera

BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera dalam menyajikan atau mencatat laporan keuangan mereka menggunakan format yang diberikan oleh PPK, PNPM MPd dan BUMDes

Bersama. Bagi pengelola BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera, laporan keuangan sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan. Melalui laporan keuangan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera dapat mengetahui perkembangan usahanya.

Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera yaitu:

1. Neraca

Neraca pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera berupa akun aktiva dan pasiva. Didalam aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berupa Kas, Bank BNI, Kas brilink, Bank Brilink, Piutang/Bon, Bank BRI Cabang, Pinjaman UEP/SPP dan Persediaan Barang kemudian aktiva tetap berupa Tanah, Bangunan, Inventaris dan Akumulasi Penyusutan. Metode yang digunakan yaitu metode FIFO atau pun metode Rata-Rata. Penyusutan dihitung dari harga beli dibagi dengan nilai ekonomis dari masing-masing barang. Asset yang disusutkan yaitu asset yang nilai belinya diatas satu juta dan dihitung umur ekonomisnya satu tahun keatas. Sedangkan pada pasiva ada kewajiban dan modal. Kewajiban berupa surplus/defisit ditahan, surplus/defisit tahun berjalan dan hutang/lain-lain serta modal berupa modal BUMDesa, brilink, rek. UEP/SPP. Bentuk neraca yang dibuat oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera yaitu bentuk *staffel*, karena memiliki bentuk memanjang kebawah, dengan peletakan akun disebelah kiri dan nominalnya di sebelah kanan.

Dari pengamatan yang peneliti dapatkan dilapangan dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Bendahara BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera dan mendapatkan hasil bahwa akun Brilink itu merekam untuk pembelian pulsa, transfer, tarik tunai yang berhubungan dengan BRI sedangkan Rek UEP/SPP merekam transaksi setoran atau penerimaan angsuran pokok dengan bunga dari kelompok UEP dan SPP.

2. Laporan Laba Rugi

Penyajian laporan laba rugi pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera berupa akun pendapatan dan biaya. Pendapatan berupa saprodi, tenun ikat, komoditi, *fee agen* dan jasa brilink, bunga bank brilink, bunga bank BNI, pendapatan lain-lain dan bunga bank BRI. Sarana produksi pertanian (Saprodi) lebih khususnya pada bagian hortikultura karena mereka melihat bahwa potensi di Nita secara umum, mereka bisa kembangkan hortikultura berupa tanam tomat, lombok dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tenun ikat sumber pendapatannya berupa penjualan benang-benang obat-obatan pewarna.

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera

SAK EMKM yaitu disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas

mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera memiliki tiga jenis usaha meliputi usaha pengkreditan, usaha perdagangan dan usaha pengelolaan pasar dengan omzet dalam kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 616.602.271, tahun 2021 sebesar Rp. 371.312.169 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.743.361.758. Omset yang dimiliki BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera termasuk dalam kategori usaha kecil dengan total penjualan tahun 2022 sebesar Rp. 1.743.361.758, maka jenis usaha tersebut termasuk unit usaha kecil karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil dengan hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera itu dilakukan oleh bendahara karena keterbatasan SDM. Selain keterbatasan jumlah SDM pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera serta dengan keterbatasan pemahaman akuntansi karena latar belakang pendidikan bendahara adalah Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM.

Menurut SAK EMKM laporan keuangan harus disajikan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Selama ini yang disajikan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera berupa neraca dan laporan laba rugi. Namun masih terdapat beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan ketentuan penyajian laporan keuangan menurut SAK EMKM. Laporan posisi keuangan menurut SAK EMKM harus disajikan dengan benar mulai dari judulnya sampai dengan isi akun-akun dalam laporan posisi keuangan. Di BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera belum menyajikan judul laporan keuangan secara tepat. Neraca pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera hanya ditulis neraca per Desember 2022 dalam satu baris sedangkan menurut SAK EMKM sebelum judul neraca atau laporan posisi keuangan harus didahulukan nama bumdes, setelah itu judul laporan posisi keuangan dan periode pelaporan, masing-masing ditulis per baris. Begitupun laporan laba rugi pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera yang harus didahulukan yaitu nama bumdes, judul laporan laba rugi dan periodenya yang diawali dengan per.

Laporan posisi keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas yang di akui di BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera itu sudah tepat meliputi aktiva,

kewajiban dan modal, hanya istilah akunya perlu disesuaikan, tidak menggunakan istilah aktiva, kewajiban dan modal tetapi menggunakan istilah aset, liabilitas dan ekuitas.

Secara ringkas analisis penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penyajian Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Akun	SAK EMKM	Penerapan Pada BUMDes	Keterangan
ASET Aset Lancar	ASET Aset Lancar: Kas Setara kas Piutang Persediaan	AKTIVA Aktiva Lancar: Kas Bank BNI Kas Brilink Bank Brilink Piutang/Bon Bank BRI Cab. Pinjaman UEP/SPP Persediaan Barang	Bahwa yang diakui BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sudah tepat, hanya perlu menyesuaikan istilah aktiva diganti dengan asset.
Aset Tetap	Aset tetap: Akumulasi Penyusutan Tanah Bangunan	Aktiva Tetap: Tanah Bangunan Iventaris Akumulasi Penyusutan	Untuk penyajian Aset tetap pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera sudah sesuai hanya perlu disesuaikan namanya yaitu istilah aktiva di ganti dengan aset dan sebaiknya akun akumulasi penyusutan jangan digabung, harus dipisahkan berupa akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan inventaris.
Kewajiban	Liabilitas: Utang Usaha Utang Bank	Pasiva Kewajiban: Surplus/defisit ditahan Surplus/defisit tahun berjalan Hutang lain-lain	BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera masih menggunakan istilah pasiva sedangkan menurut ketentuan SAK EMKM istilah pasiva sudah ditinggalkan tetapi diganti dengan kewajiban/liabilitas dan ekuitas kemudian

			didalam kewajiban tidak bisa menyajikan akun surplus/defisit tetapi harus disajikan di kelompok ekuitas.
Ekuitas	Ekuitas: Modal Saldo Laba(rugi)	Modal: Modal BUMDesa Brilink Rek. UEP/SPP	Untuk penyajian ekuitas BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera belum menyajikan secara benar berupa istilah modal diganti dengan ekuitas. Akun Brilink dan Rek. UEP/SPP seharusnya masuk dalam kelompok aset bukan ekuitas. Didalam ekuitas karena memiliki tiga unit usaha maka modal usaha bumdes dapat diklasifikasikan tiga modal yaitu modal pengkreditan, modal perdagangan dan modal pengelolaan pasar.

Sebaiknya dibuat tiga laporan posisi keuangan yang terpisah untuk memisahkan jenis usaha yang dimiliki BUMDes yaitu usaha pengkreditan, usaha perdagangan dan usaha pengelola pasar supaya memudahkan pembaca laporan keuangan bagi pengelola bumdes untuk mengetahui perkembangan usaha secara lebih rinci dari setiap jenis usaha yang dimiliki.

Analisi penyajian laporan laba rugi yang diuraikan diatas berdasarkan SAK EMKM dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Penyajian Laporan Laba Rugi

Akun	SAK EMKM	Penerapan Pada BUMDes	Keterangan
Pendapatan	Pendapatan: Pendapatan usaha Pendapatan Lain-lain	Pendapatan: Saprodi Tenun Ikat Komoditi Fee Agen Dan Jasa Brilink Bunga Bank Brilink Bunga Bank BNI Pendapatan Lain lain Bunga Bank BRI	Untuk penyajian pendapatan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sudah menyajikan secara baik hanya perlu dilakukan pemisahan. Pemisahan ini dengan maksud agar bumdes dapat mengetahui pendapatan usaha secara terpisah sebelum memasukan pendapatan lain-lain.
Beban	Beban:Beban usaha Beban lain-lain Laba/rugi sebelum pajak penghasilan: Beban pajak penghasilan Laba/rugi setelah pajak penghasilan	Biaya: BBM Operasional Pasar Operasional Lain-lain Pajak BNI Pajak Bilink Adm. BNI Adm. Brilink Peny. Iventaris SHU untuk Desa Honor Penghapusan Barang Kadaluarsa By. Bunga Hutang Pajak BRI Adm. BRI Laba/rugi	Sedangkan yang belum sesuai bumdes harus menyesuaikan akun biaya istilahnya diganti menjadi beban kemudian melakukan pengklasifikasian yang mana beban usaha dan yang mana beban lain-lain. Pemisahan beban usaha pendapatan dengan tujuan agar bumdes dapat mengetahui laba usaha sebelum mengetahui laba bersih. Kemudian pemisahan pajak dengan tujuan supaya bisa mengetahui laba sebelum pajak dan laba setelah pajak.

Laporan laba rugi juga sebaiknya dipisahkan berbeda dari tiap jenis usaha yang dimiliki BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera dengan tujuan agar mereka bisa mengetahui perkembangannya secara lebih rinci dan lebih mudah untuk mengetahui perkembangan masing-masing unit usaha.

BUMDES Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera belum menyajikan catatan atas laporan keuangan seperti yang disyaratkan standar akuntansi EMKM maka sebagai perbaikan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera harus menyajikan catatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan SAK EMKM. Didalam catatan atas laporan keuangan iktisar kebijakan akuntansi yang perlu disajikan oleh bumdes berupa kebijakan mengenai metode kas kecil, metode persediaan, metode penyusutan asset, kemudian pengakuan harga perolehan. Informasi tambahan dan rincian akun yang relevan dapat disajikan berupa asset tetap itu disajikan dari harga perolehan, tanggal perolehan dan disajikan berupa daftar asset tetap dan harga perolehan, tanggal perolehan, umur ekonomis, nilai sisa, dan nilai buku dari masing-masing per periode.

Tabel.4.7 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Akun	SAK EMKM	Penerapan Pada BUMDes	Keterangan
Catatan Atas Laporan Keuangan	Iktisar kebijakan akuntansi Informasi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.	Belum disajikan	Catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada BUMDes belum disajikan

Penyajian catatan atas laporan keuangan perlu disajikan secara terpisah mewakili tiga jenis usaha. Masing masing disajikan untuk memudahkan mereka bisa mengetahui perkembangannya secara lebih rinci dan lebih mudah untuk mengetahui perkembang dari masing-masing unit usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera berdasarkan pernyataan SAK EMKM maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas yang di akui di BUMDes Bersama Bangkit Mandiri sejahtera itu sudah tepat meliputi aktiva, kewajiban dan modal, hanya istilah akunya perlu disesuaikan, tidak menggunakan istilah aktiva, kewajiban dan modal tetapi menggunakan istilah aset, liabilitas dan ekuitas.
2. Untuk penyajian pendapatan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sudah menyajikan secara baik hanya perlu dilakukan pemisahan. Pemisahan ini dengan maksud agar bumdes dapat mengetahui pendapatan usaha secara terpisah sebelum memasukan pendapatan lain-lain. Sedangkan yang belum sesuai BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera harus menyesuaikan akun biaya istilahnya diganti menjadi beban kemudian melakukan pengklasifikasian yang mana beban usaha dan yang mana beban lain-lain..
3. Pada penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera belum sesuai dengan pernyataan SAK EMKM, karena dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan posisi

keuangan dan laporan laba rugi padahal keberadaan catatan atas laporan keuangan sangat penting juga untuk mengetahui informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan, dengan aturan penyajian laporan keuangan berdasarkan pernyataan SAK EMKM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

1. BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera perlu menyesuaikan istilah aktiva diganti dengan asset dan sebaiknya akun akumulasi penyusutan jangan digabung, harus dipisahkan berupa akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan inventaris.
2. BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sebaiknya istilah pasiva diganti dengan kewajiban/liabilitas dan modal diganti dengan ekuitas kemudian akun surplus/defisit harus disajikan di kelompok ekuitas. Akun Brilink dan Rek. UEP/SPP seharusnya masuk dalam kelompok aset bukan ekuitas
3. Untuk penyajian pendapatan BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera perlu dilakukan pemisahan. Pemisahan ini dengan maksud agar bumdes dapat mengetahui pendapatan usaha secara terpisah sebelum memasukan pendapatan lain-lain. Sedangkan yang belum sesuai BUMDes harus menyesuaikan akun biaya istilahnya diganti menjadi beban kemudian melakukan pengklasifikasian yang mana beban usaha dan yang mana beban lain-lain.
4. BUMDES Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera perlu menyajikan catatan atas laporan keuangan agar sesuai dengan SAK EMKM. Didalam catatan atas laporan keuangan iktisar kebijakan akuntansi yang perlu disajikan oleh BUMDes berupa kebijakan mengenai metode kas kecil, metode persediaan, metode penyusutan asset, kemudian pengakuan harga perolehan.
5. BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sebaiknya membuat laporan keuangan satu per satu sesuai dengan unit usaha yang dimiliki supaya pada akhir periode dilakukan rekonsiliasi.
6. Untuk peneliti berikutnya yang bermaksud meneliti penyajian laporan keuangan yang sesuai antara jenis usaha dan isi serta format laporan keuangan yang diharapkan dapat melakukan penelitian pada subjek lain maupun bidang apapun yang memiliki transaksi yang lebih besar dan beragam, penelusuran tempat-tempat yang lingkup kecil namun

memiliki operasi yang kompleks agar tidak terjadi kekeliruan akibat awamnya pengetahuan mengenai laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). *Penyusunan Laporan Keuangan Yang Baik Dan Benar Pada BUMDes*. 6, 2457–2462.
- Andriyani, A.A.I ., Martono, E., Muahamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1–16.
- Arief, Sugino Edy, U. (2016). *Praktis Dasar Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. Jakarta: Panduan Grasindo.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi (1st ed.)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ganjar, I. (2012). *Akuntansi Praktis Untuk UMKM*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Harahap, Sofyan, S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harapah, Yenni, R. (2014). Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Yang Dimiliki Pelaku UKM Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Intergrated and Comprehensive Edition)*. Jakarta: Grasindo.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, P. N. . (2015). *Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Irmah, H.B., N. (2019). *Akuntansi Dasar*. Sleman.
- Juliaty, Rifka & Prastowo, D. (2008). *Analisis Laporan Keuangan (2nd ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Justisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkaitnya*. Visimedia.
- Kasim, N. (2022). *penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Batu Mila (Analisis Akuntansi Syariah)*.
- Kasmir. (2010). *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2016a). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- _____. (2016b). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan

- SAK ETAP pada BUMDes “ Kineauan ” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95–101.
- Margaretha, V. G., Manoppo, W. S., & Pelleng, F. A. O. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT . ACE Hardware Indonesia Tbk*. 2(2).
- Moleong, L. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Muyesaroh. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*.
- Nasional, D. . (2005). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. PKDSP: FE Universitas Barawijaya.
- Negeri, P. M. . (2010). *Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Oktavia, O. (n.d.). Pererkmbangan Akuntansi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Permendes, pdtt N. (2021). *Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan /Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Milik Desa Bersama*.
- Pradhana, R. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bontonompo Jaya Di Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*.
- Putri, B. A. (2018). *Penyusunan Laporan Keuangan BUM desa Karya Mandiri Berdasarkan SAK EMKM Di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember*.
- Rejeki, D. (2020). Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3).
- Romario, F. De, Rangga, Y.D.P. and Erlin, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Journal accounting*, 1, pp. 45-53
- Sasmita, Ema S., Ayudia M, Y. (2022). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Teori Ekonomi Politik*. 2(1), 9–18.
- Soemarsono. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sonia, B. C. (2022). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Trijaya Di Desa Balung Lor Kecamatan Balung* (Issue November).
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks.
- Suradadi. (2019). *Akuntansi Pengantar* (1st ed.). Yogyakarta: Gaya Media.
- Wihelmina Mitan, Paulus Libu Lamawitak, M. F. sumiyati. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

- Publik (SAK-ETAP). *Accounting Unipa, 1*(November 2019), 1–11.
- Wild, Jhon., K. R. (2005). *Analisis Laporan Keuangan* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Yadiati, W. (2007). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.